

OPTIMALISASI PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA MELALUI PENUMBUHAN BUDI PEKERTI DALAM MEMBENTUK KARAKTER TANGGAP BENCANA

Aisyah Nur Sayidatun Nisa¹, Noviani Achmad Putri², Fredy Hermanto³, Asep Ginanjar⁴ Kiki Nurfadillah⁵

Prodi Pendidikan IPS FIS UNNES

*aisyah8816@mail.unnes.ac.id¹, noviani.ips@mail.unnes.ac.id², fredy@mail.unnes.ac.id³,
asep.ginanjar@mail.unnes.ac.id⁴ kikinurfadillah09@gmail.com⁵*

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana menjadikan pemerintah mengupayakan usaha *preventif* dalam penanggulangannya. Salah satunya adalah upaya preventif di dunia pendidikan, yaitu dengan adanya pendidikan mitigasi bencana yang mengintegrasikan budi pekerti atau nilai-nilai karakter. Dengan tujuan membentuk watak serta karakter tanggap dan paham terhadap bencana, menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan risiko bencana dan dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana. Pendidikan mitigasi bencana dilakukan dengan mengintegrasikan budi pekerti didalamnya yaitu dengan menerapkan 3 pilar, yaitu (1) penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana, (2) manajemen kebencanaan yang maksimal di sekolah, (3) pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di sekolah, dimana menyisipkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter sesuai dengan kurikulum 2013. Sehingga siswa dan masyarakat mampu untuk melakukan usaha *preventif* terhadap bencana.

Kata kunci: pendidikan, mitigasi bencana, budi pekerti

ABSTRACT

Indonesia is a disaster-prone area, making the government seek preventive efforts in its response. One of them is preventive efforts in the field of education, namely disaster mitigation education that integrates character values. The goal is to shape the character of responsiveness and understanding of disasters, foster broad public awareness about disaster risk and can reduce the losses incurred from a disaster. Disaster mitigation education is carried out by integrating character in it by implementing 3 pillars, namely 1) safe school facilities, 2) disaster management in schools, and 3) prevention and disaster risk reduction education, which inserts and fosters character values in accordance with the curriculum 2013. So that students and communities are able to make preventive efforts against disasters.

Keywords: education, disaster mitigation, character

PENDAHULUAN

Bencana alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya letak geografis, iklim serta bentuk topografi wilayah Indonesia. Secara geografis posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik (tektonik plate) yaitu lempeng Indo Australia, lempeng serta lempeng pasifik. Aktivitas yang dihasilkan oleh ketiga lempeng tersebut meningkatkan aktivitas gunung api serta menghasilkan gempa dengan intensitas yang cukup tinggi di Indonesia. Akibat dari aktivitas kegunungapian itulah yang akhirnya banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi warga dikarenakan bencana yang melanda. Posisi

Indonesia secara astronomis juga mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Peralihan antar musim tersebut menghasilkan perubahan cuaca, suhu serta arah angin yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia. Seperti akhir-akhir ini dimana sering terjadi hujan badai yang mengakibatkan daerah-daerah di Indonesia banjir, hujan yang di sertai angin kencang juga menyebabkan banyak pohon tumbang dan longsor di berbagai daerah. Hal ini membuat semakin meningkatnya risiko bencana di wilayah Indonesia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya *preventif* atau pencegahan untuk menangani hal tersebut. Dengan demikian risiko yang ditimbulkan dari suatu bencana yang terjadi dapat sedemikian rupa diminimalisir. Adanya tindakan pencegahan tentu perlu direncanakan dengan sebaik mungkin mengingat hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana supaya terealisasikan dengan baik sehingga dapat benar-benar bermanfaat.

Kondisi demikian membuat pemerintah berupaya melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan melibatkan dunia pendidikan. Gagasan untuk memasukan pendidikan kebencanaan kedalam kurikulum mulai disampaikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang paham dan tanggap terhadap bencana. Dunia pendidikan menjadi salah satu pintu masuk yang digunakan karena menurut hasil kajian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Pendidikan menyatakan jika sebesar 75% sekolah di Indonesia termasuk dalam kategori rawan terhadap bencana (worldbank, 2014). Dari data tersebut wilayah yang memiliki sekolah rawan bencana ada pada provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Anak-anak rata-rata menghabiskan waktunya lebih dari enam jam di sekolah, oleh karena itu, pemberian edukasi kebencanaan untuk mitigasi kultural, terutama yang mengarah pada jenis bencana di daerah tersebut, dirasa paling penting untuk dilakukan. Bentuk edukasi yang dilakukan mencakup cara (1) formal, dengan cara memasukkan kurikulum serta muatan lokal mengenai mitigasi bencana kedalam semua jenjang pendidikan, (2) informal, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh sekolah, peningkatan keterampilan, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan pramuka. Pendidikan mitigasi bencana yang dilakukan pada lingkup sekolah akan memperkuat fasilitas dan struktur sekolah untuk menghadapi bencana, serta memberikan bekal kepada warga sekolah melakukan evakuasi jika bencana terjadi.

Ide tersebut mendapat tanggapan yang positif dan juga negatif dari kalangan akademisi. Mendapat tanggapan positif karena sasaran yang dituju adalah kelompok rentan terpapar bencana sehingga memang rencana tersebut dirasa perlu untuk direalisasikan untuk meminimalisir korban bencana. Namun ada penentangan dari beberapa kelompok karena dianggap akan membebankan peserta didik di sekolah jika ditambahkan kedalam kurikulum yang sudah ada. Para guru juga banyak yang keberatan karena program tersebut dianggap akan menambah beban kerja mereka. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional harus dapat diwujudkan oleh lembaga pendidikan yang secara garis besar untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik serta membentuk karakter peserta didik. Guru tentunya akan berperan sebagai ujung tombak agar fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional tersebut dapat terwujud, adanya tambahan tugas untuk melakukan pendidikan bencana kepada peserta didik, sehingga banyak guru yang menolaknya.

Selain penekanan pada kemampuan akademis, dunia pendidikan juga menekankan dalam hal pembentukan karakter. Terlebih Dalam era revolusi Industri 4.0 saat ini ancaman hilangnya karakter semakin nyata. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan fase revolusi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Nilai-nilai karakter tergerus dengan derasnya arus perkembangan teknologi komunikasi yang menghilangkan sekat ruang, wilayah dan waktu.

Pemerintah menetapkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) sebagai sebuah solusi untuk melakukan penguatan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Pendidikan mitigasi bencana sejatinya adalah membentuk watak serta karakter yang tanggap dan paham terhadap bencana. Pada makalah ini akan disampaikan mengenai pengintegrasian penumbuhan nilai budi pekerti dengan pendidikan mitigasi bencana, sehingga para guru dan siswa tidak terbebani dengan program pendidikan mitigasi bencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Dimana pendidikan menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mengurangi risiko bencana dengan memasukkan pendidikan budi pekerti di semua tingkatan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Dengan pendidikan mitigasi bencana ini diharapkan mampu untuk membentuk watak serta karakter tanggap dan paham terhadap bencana, menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan risiko bencana dan dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Dasar hukum mengenai bencana, diantaranya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, kemudian Permendikbud No.23 tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti (PBD) dan Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 mengenai tugas dan fungsi PNPB menjadi penopang pokok mengenai bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan untuk kegiatan *preventif* terhadap bencana yang ada di Indonesia. Maka dari itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai pemecahan masalah tersebut dengan melakukan Pendidikan Mitigasi Bencana. Dimana pendidikan mitigasi bencana memiliki tiga pilar, yaitu 1) penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana, 2) manajemen kebencanaan di sekolah, dan 3) pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

HASIL

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Penanggulangan bencana sesuai dengan aturan tersebut tidak hanya terfokus pada hal tanggap darurat saat bencana tersebut terjadi, namun juga mengenai kegiatan sebelum bencana terjadi atau kesiapsiagaan dan juga kegiatan setelah bencana terjadi atau proses rekonstruksi / pemulihan pada daerah yang terdampak bencana.

Terjadinya suatu bencana memang tidak dikendaki dan tidak dapat dihindari, namun dengan perencanaan yang tepat serta penanggulangan yang baik kiranya dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. Indonesia telah memiliki sistem nasional penanggulangan bencana, dimana apabila antar komponen yang terdapat dalam sistem ini dapat berkerja dengan baik, maka penanggulangan bencana dapat terwujud dengan baik dan dapat direalisasikan secara nyata. Sehingga supaya Indonesia semakin tangguh dalam penanggulangan bencana, maka pendidikan mitigasi bencana ini harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Tahap prabencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Beberapa langkah antisipatif untuk mengurangi risiko penanggulangan bencana diantaranya a) pelaksanaan penataan tata ruang wilayah, b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan, c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Hal tersebut dapat di implementasikan melalui beberapa tindakan *structural* dan *nonstructural*. Tindakan *structural* misalnya pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir, tujuan dibangunnya kanal banjir ini yaitu mengimplementasikan pengendalian bencana banjir, karena seperti yang kita ketahui sendiri banjir merupakan salah satu bencana di Indonesia yang hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. *Non-Struktural*, misalnya larangan membuang sampah ke sungai atau selokan. Hal ini sering disepelekan oleh sebagian orang, masih banyak yang tidak mengindahkan hal tersebut, padahal jika hal tersebut benar-benar dapat diimplmentasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, tentu dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Lalu dapat juga dilakukan dengan mengatur tata ruang kota.

Terjadinya bencana banjir seringkali melanda wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia. Hal ini disebabkan salah satunya karena perubahan penggunaan lahan untuk membangun kawasan industri, sehingga lahan yang digunakan untuk daerah resapan air tidak ada. Sebagai mana terdapat dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 yang menjelaskan kewajiban masyarakat, yang dimana salah satunya yaitu menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain melakukan kegiatan *structural* dan *non structural*, kegiatan yang dapat dilakukan untuk penanggulangan bencana pada tahap *prabencana* yaitu, dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebencanaan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu mengenalkan dan memantau risiko bencana, dengan mengenalkan dan memantau risiko bencana, masyarakat akan lebih mengerti tentang potensi bencana yang muncul.

Masyarakat dapat lebih peka dalam melihat gejala-gejala munculnya potensi suatu bencana. Seringkali banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh suatu bencana, dikarenakan kurang peka nya masyarakat dalam melihat gejala-gejala munculnya suatu bencana, sehingga masyarakat bersikap acuh dan tidak mempersiapkan diri ketika akan muncul suatu bencana. Merencanakan partisipasi penanggulangan bencana, memberikan kesadaran bencana kepada masyarakat, melakukan upaya fisik, non fisik, mengidentifikasi dan pengenalan sumber ancaman bencana, memantau pengelolaan sumber daya alam dan lain lain. Contoh penerapannya yaitu dengan membuat peta wilayah rawan bencana, dengan demikian dapat dianalisis daerah-daerah manasaja yang rawan

terhadap bencana, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah penanggulangan bencana yang tepat untuk daerah tersebut, selain itu membuat jalur evakuasi yang kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat awam yang terkadang belum memahami sebuah peta, sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat secara tanggap dapat langsung melakukan penyelamatan.

Dengan demikian masyarakat akan mulai sadar dan paham serta dapat ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana, meskipun disebutkan dalam Undang- Undang No 24 tahun 2007 bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 mengenai hak dan kewajiban masyarakat, dinamakan disebutkan hak setiap orang antara lain; a) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. c). mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana d). berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial e). berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan f). melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Namun meskipun demikian pemberian pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebencanaan tentunya bukan hanya difokuskan pada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan akan bencana, namun ditujukan juga untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang relatif aman dengan tujuan untuk mendorong semangat gotong royong, kedermwanaan, serta menumbuhkan kepedulian antar sesama sehingga diharapkan dapat ikut serta memberikan pertolongan terhadap saudara-saudara yang tertimpa musibah.

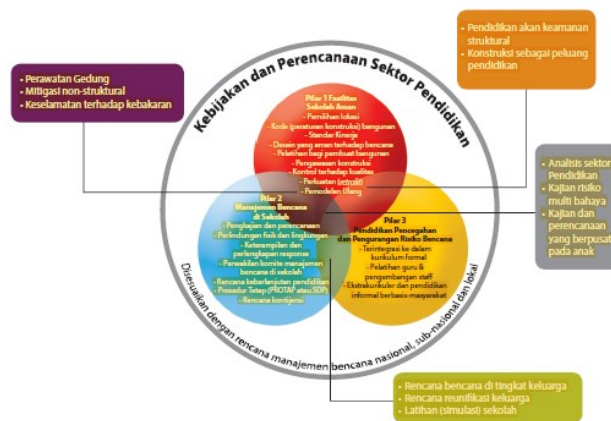
Kiranya hal ini lah menjadi alasan mengapa perlunya perencanaan penanggulangan bencana, selain untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan terjadinya suatu bencana, namun hal yang tidak kalah penting yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan risiko bencana. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat juga dirasa sangat diperlukan guna penanggulangan bencana. Pemerintah pusat sebagai komponen sistem nasional penanggulangan bencana harus bisa melakukan koordinasi antar lembaga-lembaga lain khususnya daerah untuk mengambil segala kebijakan mengenai kegiatan penanggulangan bencana.

Upaya-upaya pendidikan mitigasi tangguh bencana dikelompokkan menjadi tiga pilar, yakni : (1) penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana, (2) manajemen kebencanaan yang maksimal di sekolah, (3) pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di sekolah. Penekanan pendidikan mitigasi bencana yang sudah dilakukan selama ini lebih menekankan pada pilar pertama dan kedua, sedangkan pilar ketiga belum terlalu mendapat perhatian dari pemerintah. Jika dilakukan dengan konsisten pilar ketiga justru menjadi komponen terpenting dalam upaya mitigasi bencana, karena melalui pilar ketiga tersebut resiko dan kerugian bencana dapat diminimalisir. Adanya pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko itu berarti yang menjadi fokus adalah manusia yang terlibat langsung dengan bencana. Harapannya jika manusia yang terlibat

langsung dengan bencana sudah mendapatkan edukasi maka kerugian akibat bencana dapat dikurangi.

Terkait dengan pilar pertama pendidikan mitigasi bencana, yaitu mengenai penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana. Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup aman dan mendapatkan pendidikan, maka dari itu hal terkait kewaspadaan terhadap bencana khususnya pada dunia pendidikan dan di sekolah terutamanya harus selalu diperhatikan dan dilakukan dengan teliti. Karena ketika pendidikan terganggu dengan adanya bencana, maka pastilah akan berpengaruh juga dengan masa depan anak-anak. Maka untuk mendukung hal tersebut haruslah tersedia sekolah yang mampu untuk tetap aman ketika anak-anak menuntut ilmu. Tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama berbagai pihak baik dari pihak sekolah sendiri, stakeholder pendidikan, masyarakat maupun pemerintah (Suharwoto, 2015).

Pengetahuan dan pemahaman serta perencanaan yang matang mengenai penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa sekolah di Indonesia yang berlokasi di daerah rawan bahaya khususnya sudah dirancang dan dibangun dengan baik yang mampu melindungi masyarakat sekolah, baik itu pendidik, siswa maupun pihak terkait lainnya dari bahaya bencana. Selain itu, dengan pengetahuan dan pemahaman serta perencanaan yang baik, diharapkan juga mampu untuk memperkuat bangunan fisik sekolah sehingga semakin aman. Konsep fasilitas sekolah yang aman dari bencana yang dikembangkan menjadi sekolah aman yang komprehensif mencakup unsur-unsur sebagai sub-pilar menunjang fasilitas sekolah yang aman, dimana sub-unsur pilar utama yang menunjang pilar 1 adalah mengenai pemilihan lokasi, standar (peraturan konstruksi) bangunan, standar kinerja, desain yang aman terhadap bencana, pelatihan bagi pembuat bangunan, pengawasan konstruksi, control terhadap kualitas, permodelan ulang dan perkuatan (Suharwoto, 2015). Seperti yang tergambar berikut.



Gambar 1. Kebijakan dan Perencanaan Sektor Pendidikan (Suharwoto dkk, 2015)

Pilar kedua dalam pendidikan mitigasi bencana, yaitu mengenai manajemen kebencanaan yang maksimal di sekolah. Dimana dalam manajemen ini tetap perlu adanya kerjasama dan dukungan masyarakat dan stakeholder pendidikan juga, baik itu cakupannya desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Karena tanpa dukungan yang maksimal,

maka manajemen kebencanaan tidak akan menjadi maksimal. Sehingga jika semua pihak bisa berkontribusi maksimal dalam pengelolaan manajemen kebencanaan di sekolah ini, maka bisa dipastikan akan mendukung keamanan sekolah juga dari bencana.

Kerangka dalam menuju sekolah yang aman dari bencana tentunya yang komprehensif, pilar manajemen kebencanaan yang maksimal di sekolah memiliki delapan strategi yang dirangkum dalam tabel berikut: 1) membentuk Perwakilan Komite Manajemen Bencana Sekolah, 2) adanya kebijakan, kesepakatan dan/ atau peraturan sekolah yang mendukung upaya PRB di sekolah, 3) melakukan kajian terhadap risiko, bahaya, kerentanan dan sumber daya, 4) mengurangi risiko, 5) keterampilan merespon (SOP, rencana kontinjensi, simulasi) dan penyediaan perlengkapan kebencanaan, 6) rencana kesinambungan pendidikan, 7) pemantauan, dan 8) pengkinian (Suharwoto, 2015).

Pilar ketiga dalam pendidikan mitigasi bencana di sekolah yaitu Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana di sekolah tidak lain adalah salah satu tujuan dari pembangunan jangka panjang di Indonesia, dimana memang keberadaan Indonesia adalah wilayah yang rawan dengan bencana. Sehingga hal ini juga menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Tidak lain tujuannya adalah supaya siswa lebih awal mengenal dan memahami apa dan bagaimana sebenarnya bencana itu, yang implikasinya diharapkan siswa mampu untuk melakukan usaha pencegahan terhadap bencana. Dengan demikian siswa sudah mampu berkontribusi pada pemerintah dengan pencegahan bencana salah satunya dengan lebih menguatkan karakter budi pekerti pada diri mereka. Ketika budi pekerti siswa mampu dibentuk dan dikembangkan dengan baik, maka usaha pencegahan juga akan mengalir mengikuti.

Kerangka sekolah yang aman dari bencana yang komprehensif, pilar pendidikan PRB memiliki delapan strategi yang dirangkum dalam 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan (meliputi analisis sektor pendidikan, kajian risiko multi ancaman, kajian dan perencanaan berpusat pada anak), tahap pelaksanaan pelaksanaan pelatihan (meliputi pelatihan guru dan pengembangan staff, pendidikan bencana, ekstrakurikuler dan pendidikan informasi berbasis masyarakat) dan pendidikan serta tahap terakhir adalah tahap advokasi (meliputi terintegrasi ke dalam kurikulum dan pesan kunci berdasarkan konsensus). Dalam pilar ketiga ini juga tidak akan terlepas dari yang namanya unsur-unsur pembelajaran dan pendidikan, dimana tetap harus mengkombinasikan dan meramu unsur tersebut supaya bisa menjadi maksimal hasilnya, yaitu terkait dengan kurikulum yang diimplementasikan saat ini di sekolah adalah kurikulum 2013, dimana IPS sendiri adalah pembelajaran yang terpadu, kemudian selain kurikulum ada unsur lain yaitu guru, metode atau model pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi akhir dalam pembelajaran. Dan dalam pembelajaran inipun seperti yang penulis sampaikan dan sesuai dengan kurikulum 2013 adalah dengan tetap menyisipkan dan membelajarkan budi pekerti atau nilai-nilai karakter.

Pendidikan mitigasi bencana ini sebenarnya adalah secara tidak langsung sudah menanamkan nilai-nilai karakter yang diatur dalam kurikulum dan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sehingga tidak hanya

pengintegrasian budi pekerti ini bermanfaat bagi guru saja, tapi juga bagi siswa dan imbas luasnya adalah bagi masyarakat.

Pendidikan Mitigasi Bencana akan berhasil jika mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu lingkungan formal dalam pendidikan maupun lingkungan diluar pendidikan. Dengan kata lain kesiapsiagaan bencana bisa dilakukan dengan beberapa hal yaitu dimilikinya pengetahuan sikap dan perilaku yang mendukung mitigasi bencana, informasi cepat lengkap dan akurat mengenai kebencanaan, perlengkapan yang memadai dan koordinasi yang baik di segala aspek dan segala pihak.

SIMPULAN

Pendidikan Mitigasi Bencana dengan pengintegrasian budi pekerti atau nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam tiga pilar pendidikan mitigasi bencana ini diharapkan mampu untuk menjadi upaya *preventif* untuk mitigasi bencana dalam lingkup sekolah dan Indonesia dimana posisi sekolah dan Indonesia pada umumnya yang merupakan daerah rawan bencana dengan dukungan dari semua pihak, yakni mampu untuk membentuk watak serta karakter tanggap dan paham terhadap bencana, menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan risiko bencana dan dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari suatu bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Honesti, Leli dan Djali, Nazwar. 2012. Pendidikan kebencanaan di Sekolah-sekolah di Indonesia berdasarkan Beberapa Sudut Pandang Disiplin Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Momentum*. Vol.12.No.1. Februari 2012.
- Robi Amri, Mohd dkk. 2016. *RBI Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB Direktorat Pengurangan Risiko Bencana.
- Suhawoto, Gotot dkk. 2015. Modul 1. Pilar 1-Fasilitas Sekolah Aman. Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan unicef.
- Suhawoto, Gotot dkk. 2015. Modul 2. Pilar 2-Manajemen Bencana di Sekolah. Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan unicef.
- Suhawoto, Gotot dkk. 2015. Modul 3. Pilar 3-Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana. Jakarta: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan unicef.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi BNPB.
- Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).